

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA AGEN BRILINK
DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG
SLEMAN ATAS PENGENAAN BIAYA TRANSAKSI
(STUDI KASUS: AGEN BRILINK TOKO MAHASISWA DAN TOKO
NICO BRILINK GRENJENG)**

Oleh:

Sheila Addinda Salsabela¹, Dr. Murti Pramuwardani Dewi, S.H., M. Hum.²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya ketidaksamaan pengenaan biaya transaksi dalam perjanjian kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sleman dengan para Agen BRILink beserta perlindungan terhadap konsumen atas perbedaan biaya transaksi yang diterapkan oleh para Agen BRILink.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dengan responden. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, penyebab terjadinya ketidaksamaan pengenaan biaya transaksi dalam dalam perjanjian kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sleman dengan para Agen BRILink yaitu karena adanya tindakan Agen BRILink yang melakukan wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan berupa melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian, yaitu membebankan biaya tambahan yang seharusnya menjadi beban penyelenggara kepada nasabah. Kedua, perlindungan terhadap konsumen atas perbedaan biaya transaksi yang diterapkan oleh Agen BRILink belum cukup memadai yang ditunjukkan dengan rendahnya kesadaran pelaku usaha serta fasilitas layanan perlindungan konsumen yang diprakarsai oleh Bank Rakyat Indonesia belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Perjanjian, Agen BRILink, Perlindungan Konsumen

¹ Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Univeristas Gadjah Mada

² Dosen Pembimbing Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***JURIDICIAL REVIEW OF THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN
BRILINK AGENT AND PT. BANK RAKYAT INDONESIA SLEMAN
BRANCH OFFICE REGARDING THE TRANSACTION FEE
(CASE STUDY: AGEN BRILINK TOKO MAHASISWA AND TOKO NICO
BRILINK GRENJENG)***

Sheila Addinda Salsabela¹, Dr. Murti Pramawardani Dewi, S.H., M. Hum.²

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the causes of inequality in the imposition of transaction fees in the cooperation agreement between PT. Bank Rakyat Indonesia Sleman Branch Office with BRILink Agents and the protection of consumers from differences in transaction fees applied by BRILink agents.

This research is descriptive with the type of empirical juridical research. Empirical research is carried out by field research, namely through interviews with respondents. In this study, literature research was conducted to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials and field research to obtain primary data. Data from library research and field research were then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that: First, the cause of the inequality in the imposition of transaction fees in the cooperation agreement between PT. Bank Rakyat Indonesia Sleman Branch Office with BRILink Agents is due to the actions of BRILink agents who default. The form of default is in the form of doing something that may not be done in the agreement, namely imposing additional fees on the customer, while the additional costs should be the burden of the organizer. Second, the protection for consumers over the difference in transaction fees applied by BRILink agents is not sufficient enough as indicated by the low awareness of business actors and customer protection service facilities initiated by Bank Rakyat Indonesia that have not been implemented properly.

Keywords: Agreement, BRILink Agent, Consumer Protection

¹ Undergraduate Student at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

² Legal Writing Supervisor at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada